



RENCANA KERJA TAHUN 2016

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

ABSTRACT
BACKGROUND

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
2016**



Kata Pengantar

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan mahluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2016 (Renja Ditjen PPKL 2016). Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019 dan Rencana Strategis Ditjen. PPKL Tahun 2015–2019.

Renja Ditjen PPKL Tahun 2016 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan; Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Unit Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan; Kerangka Regulasi; dan Kerangka Pendanaan.

Renja Ditjen PPKL Tahun 2016 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.

Renja Ditjen PPKL Tahun 2016 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renja Ditjen PPKL Tahun 2016 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan Ditjen PPKL.

Jakarta, Maret 2016

Dirjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan



M.R. Karliansyah



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Mekanisme Penyusunan	3
1.3. Program Tahun 2015	3
1.4. Capaian IKU dan IKK Tahun 2015	6
1.5. Program Tahun 2015 - 2019	
BAB II SASARAN STRATEGIS 2016	10
2.1. Sasaran Strategis Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	10
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016	17
3.1. Arah Kebijakan	17
3.2. Program Tahun 2016	17
3.3. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2016	18
BAB VI PENUTUP	26
LAMPIRAN	37

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama	4
Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan	4
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015	6
Tabel 4. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	11
Tabel 5. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1/4	27
Tabel 6. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2/4	27
Tabel 7. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3/4	28
Tabel 8. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 4/4	28
Tabel 9. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 1/3	28
Tabel 10. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 2/3	29
Tabel 11. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 3/3	29
Tabel 12. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 1/4	30
Tabel 13. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 2/4	30
Tabel 14. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 3/4	31
Tabel 15. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 4/4	31
Tabel 16. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 1/5	31

Tabel 17. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 2/5	32
Tabel 18. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 3/5	32
Tabel 19. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 4/5	33
Tabel 20. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 5/5	33
Tabel 21. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #1/5.....	33
Tabel 22. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #2/5.....	34
Tabel 23. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #3/5.....	34
Tabel 24. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #4/5.....	34
Tabel 25. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #5/5.....	35
Tabel 26. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #1/3	35
Tabel 27. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #2/3	36
Tabel 28. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #3/3	36





RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB I. Pendahuluan



BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2015 telah merubah pola kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2016 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 03/PPKL-Setdit/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penjabaran pelaksanaan Renstra 2015-2019 secara bertahap dilakukan dengan penyusunan

Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2016 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2016 merupakan lanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010-2015 dihadapkan pada pencemaran air dan udara dari kegiatan industri, jasa, rumah tangga, transportasi serta kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir dan laut; potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan serta semakin meningkatnya dampak akibat fenomena perubahan iklim. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2016 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

1.2. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Renja Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen PPKL Tahun 2015-2019, yang dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan. Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada tahun anggaran 2015, arah kebijakan dan strategi Ditjen PPKL tahun 2015, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Penyusunan Renja Tahun 2016 dilakukan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara intensif dengan direktorat-direktorat yang ada di Ditjen PPKL. Masing-masing direktorat melakukan rapat kerja teknis untuk mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

1.3. Program Tahun 2015

Sasaran prioritas nasional Tahun 2010-2014 adalah terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terjaganya kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Indikator sasaran prioritas yang menjadi dasar evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 adalah:

1. Menurunnya tingkat pencemaran,
2. Meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan,
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dan ketersediaan data serta informasi pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2015 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berfokus pada hasil kerja berupa tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung peningkatan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Selain itu, Ditjen. PPKL melakukan pengendalian bahan-bahan pencemar dan pembinaan kerja dan tanggung jawab perusahaan pemegang ijin dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Ditjen. PPKL melakukan pengelolaan kesatuan hidrologi gambut.

Indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari indikator-indikator kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam diagram pada Tabel 1 berikut ini. Evaluasi capaian kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Meningkatnya Kualitas Udara.	Indeks Kualitas Udara Meningkat	81
b.	Meningkatnya Kualitas Air.	Indeks Kualitas Air Meningkat	52
c.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan.	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	59
d.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut.	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun.	Baseline
e.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut.	Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Terpulihkan	50 Ha

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengendalian Pencemaran Udara (K1)	Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014		
		Beban emisi udara dari sektor industri turun dibanding basis data tahun 2014	4%
		Pembangunan peralatan pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu di sejumlah 45 kota	-
		Jumlah kota yang menerapkan sistem green transportation	Kriteria GT

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah kota yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien (dari 45 kota yang dipantau)	37 Kota
Pengendalian Pencemaran Air (K2)	Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe).		
		Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada DAS prioritas secara kontinyu	2 sungai
		Jumlah sungai yang telah ditetapkan daya tampung beban pencemarannya	3 sungai
		Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD dan E-Coli)	3 sungai
		Beban pencemaran air turun 50 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas	1%
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (K3)	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015.		

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Bali) meningkat setiap tahun	3 Kawasan pesisir (NCICD)
		Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, terumbu karang.	7 Kawasan
	Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit	5 unit
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (K4)			
		Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	3 Provinsi
		Luas lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun mencapai 25% dari basis data rata-rata tahun 2010 dan 2014	5%
Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (K5)	Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir.		
		Kawasan yang ditetapkan peta satuan hidrologis gambutnya,	5 KHG

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dari 4 juta Ha luas indikatif KHG Babel, Bengkulu, Lampung, Aceh, Sumbar, Sumsel dan Sumut	
		Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung	-
		Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	-
		Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) di luar kawasan hutan yang terpulihkan meningkat setiap tahun	50 Ha
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (K6)	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH		
		SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 71,00 (A) di tahun 2019	71

1.4. Capaian Tahun 2015

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan telah menjamin ketersediaan instrumen dan regulasi untuk mendukung peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Selain itu, Ditjen. PPKL telah melakukan pengendalian bahan-bahan pencemar dan pembinaan kinerja serta tanggung jawab perusahaan pemegang ijin dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal pemulihan kerusakan gambut, Ditjen. PPKL telah mulai melakukan pengelolaan kesatuan hidrologi gambut. Hal-hal diatas dijabarkan dalam capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

1. Capaian IKU Tahun 2015

Realisasi pencapaian target-target IKU yang ditetapkan pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Meningkatnya Kualitas Udara.	Indeks Kualitas Udara Meningkat	84,96
b.	Meningkatnya Kualitas Air.	Indeks Kualitas Air Meningkat	53,10

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
c.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan.	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	58,55
d.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut.	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun.	Baseline
e.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut.	Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Terpulihkan	173 Ha
f.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	80.68

2. Capaian IKK Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama diturunkan dalam bentuk yang lebih terukur ke dalam 17 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dibagi dalam 5 Sasaran Strategis, yaitu:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Capaian RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengendalian Pencemaran Udara (K1)	Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014			
		Beban emisi udara dari sektor industri turun	5,9%	147,5%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Capaian RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dibanding basis data tahun 2014		
		Pembangunan peralatan pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu di sejumlah 45 kota	-	-
		Jumlah kota yang menerapkan sistem green transportation	1 Dok Kriteria GT	100%
		Jumlah kota yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien (dari 45 kota yang dipantau)	39 Kota	134,48%
Pengendalian Pencemaran Air (K2)	Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe).			
		Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada DAS prioritas secara kontinyu	2 DAS	100%
		Jumlah sungai yang telah ditetapkan daya tampung beban pencemarannya	3 sungai	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Capaian RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD dan E-Coli)	0 sungai	0%
		Beban pencemaran air turun 50 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas	4,26%	426%
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (K3)	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015.			
		Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Bali) meningkat setiap tahun	Baseline 3 kawasan pesisir (NCICD)	100%
		Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, terumbu karang.	5 unit	100%
	Menurunnya tingkat keru-	Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan	10 kawasan	142,85%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Capaian RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sakan wilayah pesisir dan laut	nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit		
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (K4)				
		Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	3 provinsi	100%
		Luas lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun mencapai 25% dari basis data rata-rata tahun 2010 dan 2014	5,8%	116%
Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (K5)	Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir.			
		Kawasan yang ditetapkan peta satuan hidrologis gambutnya, dari 4 juta Ha luas indikatif KHG Babel, Bengkulu, Lampung, Aceh, Sumbar, Sumsel dan Sumut	5 KHG	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Capaian RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung	-	
		Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	-	
		Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) di luar kawasan hutan yang terpulihkan meningkat setiap tahun	173 Ha	346%
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (K6)	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH			
		SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 71,00 (A) di tahun 2019	80,68	113,63%



RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB II. Sasaran Strategis Tahun 2016



BAB II. Sasaran Strategis Tahun 2016

2.1. Sasaran Strategis Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Tabel 7, sedangkan penjabaran kerangka pikir pada tingkat Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 7 Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019	
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	
Misi Nasional	
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	
Tujuan Pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019	Peran Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019
Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; 2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta <i>endangered species</i>; 3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Tabel 4. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019					
“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”					
Indikator Tujuan					
1. Tercapainya kualitas udara yang sehat 2. Tercapainya peningkatan kualitas air 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka 6. Terlaksananya reformasi birokrasi					
Sasaran Program					
1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Menurunnya beban pencemaran air; 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; 4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut; 5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; 6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.					
Sasaran Kegiatan					
UDARA: Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014	AIR: Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BOD _e).	PESISIR LAUT: 1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015. 2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut.	GAMBUS Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan	LAHAN AKSES TERBUKA Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	DUKUNGAN MANAJEMEN: Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019.

Sasaran Unit Kegiatan					
UDARA: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara; 3. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak; 5. Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi.	AIR: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran air dalam upaya pencapaian menurunnya beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 2. Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 3. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 4. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah domestik dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 5. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air.	PESISIR LAUT: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; 2. Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015; 3. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah I; 4. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah II.	GAMBUS: 1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; 2. Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan; 3. Efektivitas pengendalian kerusakan gambut.	LAHAN AKSES TERBUKA: 1. Efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan; 2. Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama; 3. Efektivitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta hasil pelebagaan pemangku kepentingan.	DUKUNGAN MANAJEMEN: 1. Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dansasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 2. Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana; 3. Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan; 4. Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat ditunjukkan dengan tabel di bawah ini :

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM		KINERJA KEGIATAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)	Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)			
		Meningkatnya kualitas udara (S1.P10.1)	Indeks kualitas udara meningkat menjadi 84 di tahun 2019 (S1.P10.1.IKP)	Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014 (S1.P10.K1.1)	Persentasi Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15 % dari basis data 2014 (S1.P10.K1.1.IKK.a)
					Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota (S1.P10.K1.1.IKK.b)
					Jumlah Kota yang menerapkan “green transportation” sebanyak 45 kota (S1.P10.K1.1.IKK.c)
				d. Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau) (S1.P10.K1.1.IKK.d)	
		Meningkatnya kualitas air (S1.P10.2)	Indeks kualitas air meningkat menjadi 55 di tahun 2019 (S1.P10.2.IKP)	Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe) (S1.P10.2.K2.2)	Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu (S1.P10.2.K2.2.IKK.a)
					Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya (S1.P10.2.K2.2.IKK.b)
					Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) (S1.P10.2.K2.2.IKK.c)
					Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar (S1.P10.2.K2.2.IKK.d)

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM		KINERJA KEGIATAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan (S1.P10.3)	Indeks tutupan lahan meningkat menjadi 62 di tahun 2019 (S1.P10.3)	Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir (S1.P10.3.K4.3)	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) (S1.P10.3.K4.3.IKK.a) Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014(S1.P10.3.K4.3.IKK.b)
				Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.3.K6)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point) (S1.P10.3.K6.IKK.a)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)			
		Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.1)	Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun (S3.P10.1.IKP)	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 (S3.P10.1.K3)	Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun (S3.P10.1.K3.IKK.a)
				Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.2.K3)	Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit (S3.P10.1.K3.IKK.b)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut (S3.P10.2)	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun (S3.P10.2.IKP)	Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan (S3.P10.2.K5)	Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya (S3.P10.2.K5.IKK.a)

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM		KINERJA KEGIATAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
					Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung (S3.P10.2.K5.IKK.b)
					Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.c)
					Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.d)



RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB III. Program dan Kegiatan Tahun 2016



BAB III. Program dan Kegiatan Tahun 2016

3.1. Arah Kebijakan

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2016 arah kebijakan yang dilakukan Ditjen. PPKL kepada perbaikan lingkungan secara nyata di 15 DAS guna mendorong peningkatan IKLH dan ketahanan air, untuk : tutupan lahan, BOD-COD-Ecoli, udara. Posisi rencana kerja ini merupakan instrumen untuk menginternalisasi sasaran program yang telah tersusun dalam rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Ditjen. PPKL dalam melaksanakan programnya diantaranya :

- Memperluas kriteria program Adipura yang komprehensif (matra air, udara, lahan, sampah, kelembagaan, dan kapasitas SDM).
- memperluas cakupan program Proper yang mengarah pada industri yang lebih ramah lingkungan;

- mengembangkan dan mengimplementasikan skema insentif dan disinsentif untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- menyusun Inpres dan Road Map pencegahan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

3.2. Program Tahun 2016

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menjadi penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai beberapa tugas yang perlu diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan dan mendukung terhadap sasaran strategis Kementerian dalam Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan

hidup yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Ditjen. PPKL mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan.

Dimana ketiga peran tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknis pada Ditjen. PPKL. Adapun target untuk Indikator Kinerja Utama Ditjen. PPKL sebagai berikut :

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara Meningkat	81,5
	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air Meningkat	52,5
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	59,5
	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun.	5 % dan 12 Kawasan Pesisir
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	Luas lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan	150 Ha
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	73 poin

3.3. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2016

Dalam melaksanakan programnya, Ditjen. PPKL mempunyai beberapa kegiatan diantaranya :

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
029.13.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		107,080,000,000
5457	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup		36,987,000,000
5457.002	SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	73 Poin	9,042,120,000
5457.002.001	PROGRAM DAN EVALUASI ANGGARAN		3,170,281,000
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan		501,010,000
052	Pengelolaan Evaluasi, Data & Informasi, dan Kehumasan		923,500,000
053	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen. PPKL		298,155,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
054	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		1,274,706,000
055	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		172,910,000
5457.002.002	Pembinaan Kepegawaian dan Penyusunan Organisasi Tata Laksana		541,330,000
051	Pembuatan Aplikasi Absensi Ditjen.PPKL		50,000,000
052	Pembenahan Arsip Kepegawaian Ditjen. PPKL		100,000,000
054	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai		241,250,000
055	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan		150,080,000
5457.002.003	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan		920,953,000
051	Penyusunan Juknis dan SOP Pengelolaan Keuangan dan Umum		292,260,000
052	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan - BMN		150,400,000
053	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan, Kebijakan lelang, Pengadaan barang/ jasa dan ketatausahaan		126,000,000
054	Pengembangan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik		352,293,000
5457.002.004	HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK		4,409,556,000
051	Penyelenggaraan Kesekretariatan PROPER		3,682,966,000
052	Penyusunan Sistem Informasi Online Pelayanan Izin IPLC dan Injeksi		258,620,000
053	Layanan Pelaksanaan Kerja Sama Teknik		74,040,000
054	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Ditjen PPKL		393,930,000
5457.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	27,000,000,000
5457.994.001	Penyelenggaraan Operasional Kantor dan Pemeliharaan kantor		27,000,000,000
001	Gaji dan Tunjangan		23,184,574,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		3,815,426,000
5457.995	Kendaraan Bermotor	2 Unit	944,880,000
051	Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon		944,880,000
5458	Pengendalian Pencemaran Udara		17,810,000,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5458.001	Penurunan beban pencemaran udara	7 Persen	1,201,417,000
5458.001.001	Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak		1,201,417,000
051	Penerapan Model Penurunan Beban Pencemar udara dari 7 Sektor		108,800,000
052	Melaksanakan Evaluasi Kinerja PPU Industri Pertambangan, Energi, dan Migas		445,497,000
053	Melaksanakan evaluasi Kinerja PPU Industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ)		398,508,000
054	Menyusun Muatan Teknis NSPK di Udara		248,612,000
5458.002	sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu	3 Kota	9,671,261,000
5458.002.001	Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi		9,671,261,000
051	Terlaksananya pemasangan peralatan serta sistem jaringan AQMS dan terpublikasinya data kualitas udara ambien di 45 kota		9,449,534,000
052	Tersusunnya kajian strategi dan pedoman pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan gangguan		221,727,000
5458.003	Penerapan "green transportation" di perkotaan	3 Kota	2,034,990,000
5458.003.001	Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak		2,034,990,000
051	Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi darat		85,000,000
052	Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat		735,476,000
053	Evaluasi penerapan green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi darat		1,214,514,000
5458.004	Pemenuhan baku mutu Kualitas Udara Ambien di perkotaan	9 Kota	4,902,332,000
5458.004.001	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara		712,083,000
051	Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran udara		712,083,000
5458.004.002	Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara		3,376,279,000
051	Tersedianya data inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi di kab/kota dan 7 sektor industri serta pemutakhirannya		744,114,000
052	Tersedianya Status Mutu Udara		2,393,271,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
053	Terlaksananya penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara (WPKU)		238,894,000
5458.004.003	Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak		477,840,000
051	Terpenuhinya baku mutu kualitas udara ambien perkotaan		477,840,000
5458.004.004	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN SECARA KONTINYU DI 45 KOTA DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN NON INSTITUSI		336,130,000
051	Tersedianya laporan pengendalian pencemaran udara		336,130,000
5459	Pengendalian Pencemaran Air		14,200,000,000
5459.001	Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada DAS prioritas secara kontinyu	2 DAS	5,015,468,000
051	Pengembangan Sistem Pemantauan Kualitas Air		5,015,468,000
5459.002	Jumlah sungai yang telah ditetapkan daya tampung beban pencemarannya	4 Sungai	1,356,196,000
051	Jumlah Sungai Telah Ditetapkan Alokasi Beban Pencemarannya		1,356,196,000
5459.003	Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)	6 Sungai	6,553,097,000
5459.003.001	Perbaikan Kualitas Air		2,244,126,000
051	Penanggulangan Pencemaran Dalam Rangka Pemenuhan Alokasi Beban		2,244,126,000
5459.003.002	PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH DOMESTIK		2,750,934,000
051	Pembangunan Pilot Project IPAL Domestik dalam rangka penurunan beban pencemar		1,678,011,000
052	Penyusunan DED Pengelolaan Limbah Domestik DAS Bengawan Solo		336,903,000
053	Pembuatan Model Pemanfaatan Air Limbah Kegiatan Hotel dan Apartemen		240,061,000
054	Pembinaan Dalam Rangka Penilaian Kinerja Industri Sektor Prasarana Jasa		495,959,000
5459.003.003	PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH USAHA SKALA KECIL DAN NON INSTITUSI		1,558,037,000
051	Pembangunan Pilot Project IPAL Usaha Skala Kecil dalam rangka penurunan beban pencemar		1,368,991,000
052	Penyusunan Kajian Pengendalian Pencemaran Sumber Non Institusi		189,046,000
5459.004	Beban pencemaran air turun dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas	5 Persen	1,275,239,000
5459.004.001	PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN AIR SEKTOR INDUSTRI		1,275,239,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
051	Pembinaan Dan Supervisi Dalam Rangka Penurunan Beban Pencemaran Air Dari Sektor Industri		924,513,000
052	Penyusunan Dokumen Dalam Rangka Penurunan Beban Pencemaran Air Sektor Industri		350,726,000
5460	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		12,500,000,000
5460.001	Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang dan Bali)	3 NCICD	1,016,231,000
5460.001.001	Inventarisasi Kualitas air di perairan 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang dan Bali)		1,016,231,000
051	Perhitungan Beban Pencemaran di 3 Kawasan Pesisir (Teluk Jakarta, Teluk Semarang dan Teluk Benoa, Bali)		297,716,000
052	Status mutu laut (Teluk Jakarta, Teluk Semarang dan Bali)		718,515,000
5460.003	Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk	2 Unit	3,494,273,000
5460.003.001	Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk di Wilayah I		1,469,267,000
051	Pembangunan IPAL di Perkampungan nelayan di Wilayah I		1,115,395,000
052	Pemantauan Kualitas Air Limbah dari IPAL dan Kualitas Air Laut di Lokasi IPAL		272,972,000
053	Pengendalian Pencemaran air laut melalui izin pembuangan air limbah ke laut		80,900,000
5460.003.002	Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk di Wilayah II		2,025,006,000
051	Pembangunan dan Beroperasinya IPAL di Wilayah II		1,960,606,000
053	Pengendalian Pencemaran air Laut Melalui Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut		64,400,000
5460.006	Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang	12 kawasan	7,989,496,000
5460.006.001	Perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan dalam rangka pemulihan fungsi ekosistem pesisir dan laut		1,784,475,000
051	Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		230,549,000
052	Pengembangan kerjasama dalam pengendalian pencemaran kerusakan pesisir dan laut		388,792,000
053	Penyusunan Standar dan Baku Mutu Lingkungan Pesisir dan Laut		914,328,000
054	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		250,806,000
5460.006.002	Inventarisasi dan Status Mutu Lingkungan Pesisir dan Laut		2,191,115,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
051	Inventarisasi kualitas dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut		902,247,000
052	Status Mutu Laut		1,288,868,000
5460.006.003	Pemulihan fungsi ekosistem pesisir dan laut di wilayah I		2,520,787,000
051	Pemulihan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah I		1,887,839,000
052	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah I		632,948,000
5460.006.004	Pemulihan fungsi ekosistem pesisir dan laut di wilayah II		1,493,119,000
051	Pemulihan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah II		1,291,175,000
052	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Wilayah II		201,944,000
5461	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		11,500,000,000
5461.001	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	3 Provinsi	2,410,006,000
5461.001.001	Inventarisasi Kerusakan Lahan Akses Terbuka		2,410,006,000
051	Menyediakan Baseline Data dan Pemutakhiran Data Kerusakan (3 Provinsi)		2,073,336,000
052	Perhitungan Indeks Tutupan Lahan 33 Provinsi		336,670,000
5461.002	Luas lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun dari basis data rata-rata 2010-2014	10 Persen	9,089,994,000
5461.002.001	Perencanaan dan Evaluasi		1,142,273,000
053	Penyusunan Rencana Tata Kelola Pemulihan		751,649,000
054	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		209,724,000
055	Penyusunan Laporan Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		180,900,000
5461.002.003	Fasilitasi Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		7,947,721,000
056	Fasilitasi Pencegahan dan Pemantauan Lahan Akses Terbuka		1,122,050,000
057	Fasilitasi Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		6,005,255,000
058	Pengembangan Model Pelembagaan		820,416,000
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut		14,083,000,000
5462.002	Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) di luar kawasan hutan yang terpulihkan	150 Hektar	7,542,750,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
012	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional		385,798,000
013	Fasilitasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk Provinsi/Kab/Kota		1,762,458,000
014	Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaannya tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut		492,040,000
015	Pemulihan		4,902,454,000
5462.003	Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya	3 KHG	3,781,766,000
012	Inventarisasi Karakteristik Kesatuan Hidrologis Gambut		3,781,766,000
5462.004	Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung	5 KHG	1,532,531,000
012	Penetapan Fungsi Lindung		1,532,531,000
5462.005	Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	3 KHG	1,225,953,000
012	Pemantauan kualitas ekosistem gambut		1,225,953,000



RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB IV. Penutup



BAB IV. Penutup

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja Kementerian melalui peran Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selain itu, dokumen renja ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2016 oleh seluruh unit kerja yang ada di Ditjen. PPKL. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada dari unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Ditjen. PPKL dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan kordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen LAKIP.

Lampiran

1. Matriks Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen, Setditjen PPKL memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja.

Tabel 5. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)		
Sasaran Unit Kegiatan #1/4	:	Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK, RKAKL).		4 Dok	4 Dok
2.	Tersedianya dokumen pelaporan (Monev Triwulan, LKj, dan Laporan RENJA).		4 Lap	6 Lap
3.	Terselenggaranya layanan kehumasan, data dan informasi.		5 Publikasi	24 Publikasi

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah.	100%	100%
5.	Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level 1	Level 1

Tabel 6. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)	
Sasaran Unit Kegiatan #2/4	:	Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan pembinaan kapasitas SDM	234 Pegawai	234 Pegawai
2.	Terselenggaranya bulan layanan administrasi kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan
3.	Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	-	1 Laporan

Tabel 7. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)		
Sasaran Unit Kegiatan #3/4	:	Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA).		11 Laporan	11 Laporan
2.	Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan.		1 Laporan	1 Laporan
3.	Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum.		1 Juknis	1 Juknis
4.	Terselenggaranya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik.		1 Laporan	1 Laporan

Tabel 8. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 4/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)		
Sasaran Unit Kegiatan # 4/4	:	Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		30 RaPer.	35 RaPer.

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Terselenggaranya sosialisasi peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	--	2 kali
3.	Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	5 Kerjasama	7 Kerjasama
4.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik.	1 Laporan	1 Laporan
5	Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan

b. Direktorat Pengendalian Gambut

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Gambut memiliki 3 (tiga) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 9. Direktorat Pengendalian Gambut :
Sasaran Unit Kerja # 1/3

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut		
Sasaran Unit Kegiatan # 1/3	:	Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem Gambut		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya sebaran ekosistem gambut pada KHG Nasional skala 1:250.000	1 (peta dan diskripsi final 673 KHG dengan luas indikatif 26.353.976 Ha)	--
2.	Tersedianya peta dan karakteristik ekosistem gambut pada KHG skala 1:50.000	5 KHG	9 KHG
3.	Tersedianya bahan penetapan indikatif fungsi lindung ekosistem gambut skala 1:250.000	6.071.011 Ha (usulan)	6.071.011 Ha (ditetapkan)
4.	Tersedianya bahan penetapan indikatif fungsi budidaya ekosistem gambut skala 1:250.000	20.282.966 Ha (Usulan)	20.282.966 Ha (ditetapkan)
5.	Tersedianya bahan penetapan fungsi ekosistem gambut pada KHG skala 1:50.000	---	5 KHG
6.	Tersedianya Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	2 laporan	2 laporan

*Tabel 10. Direktorat Pengendalian Gambut
Sasaran Unit Kerja # 2/3*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut		
Sasaran Unit Kegiatan # 2/3	:	Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional	2 dokumen	1 dokumen (RPPEG Nasional)
2.	Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Propinsi	2 dokumen	3 Propinsi
3.	Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten	1 dokumen	6 Kabupaten
4.	Tersedianya bahan evaluasi rencana pengendalian kerusakan ekosistem gambut	1 dokumen	1 Dokumen
5.	Tersedianya draft permanen	-	8 Draft Permanen

*Tabel 11. Direktorat Pengendalian Gambut
Sasaran Unit Kerja # 3/3*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut		
Sasaran Unit Kegiatan # 3/3	:	Efektivitas pengendalian kerusakan gambut		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan pemantauan dan luasan lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun		2 dokumen	1 dokumen
2.	Terlaksananya evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan kehutanan di konsesi gambut		-	27 Perusahaan

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan pemantauan dan luasan lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	2 dokumen	1 dokumen

* 50 hektar dibiayai APBN dan dilakukan oleh KLHK, selebihnya partisipasi berbagai multi stakeholder

c. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 12. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 1/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	
Sasaran Unit Kegiatan # 1/4	:	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	1 dokumen	1 dokumen
2.	Jumlah kerjasama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	3 kerjasama	4 kerjasama

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Jumlah standar dan baku mutu lingkungan pesisir dan laut	3 evaluasi baku kerusakan	- 3 rancangan peraturan kriteria baku kerusakan - 2 evaluasi peraturan
4.	Tersedianya laporan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	1 laporan	1 laporan
5.	Tersedianya Indeks Kualitas Air Laut	-	1 Kawasan

Tabel 13. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 2/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	
Sasaran Unit Kegiatan # 2/4	:	Efektivitas inventarisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data sumber pencemar, volume beban pencemar dan tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut	5 kawasan	8 kawasan
2.	Inventarisasi kualitas lingkungan pesisir dan laut	2 kawasan	8 kawasan
3.	Tersedianya status mutu air laut	2 Kawasan	5 kawasan

Tabel 14. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 3/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		
Sasaran Unit Kegiatan # 3/4	:	Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah I		
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut	18 ijin	18 ijin	
2.	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun dan kegiatan /usaha yang memiliki ijin pembuangan air limbah ke laut	-	5 lokasi	
3.	Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistem pesisirnya	6 kawasan	7 kawasan	
4.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah 1	2 kawasan	1 kawasan	
5.	Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah I	3 unit	1 unit	

Tabel 15. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #4/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		
Sasaran Unit Kegiatan # 4/4	:	Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah II		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut		5 ijin	10 ijin
2.	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun dan kegiatan /usaha yang memiliki ijin pembuangan air limbah ke laut		-	2 Lokasi

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Jumlah kawasan yang dipulihkan	4 kawasan	4 kawasan
4.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah 1	1 kawasan	1 kawasan
5.	Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah II	-	2 unit

d. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air memiliki 5 (lima) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 16. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 1/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air		
Sasaran Unit Kegiatan #1/5	:	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran air dalam upaya pencapaian menurunnya beban pencemaran dan perbaikan kualitas air		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersusunnya rencana kerja pengendalian pencemaran air		1 dok	1 dok

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Tersedianya konsep kebijakan (pedoman, standar dan atau kriteria) pengendalian pencemaran air yang meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan ketanggap darurat pencemaran air	13	6
3.	Jumlah kerjasama dengan pihak lain (perguruan tinggi dan institusi lainnya) dalam rangka mendukung pengendalian pencemaran air dan penurunan beban pencemaran air	2	2
4.	Tersusunnya laporan kinerja tahunan pengendalian pencemaran air	1 Lap	1 Lap
5.	Tersedianya draft RPP Pengendalian Pencemaran Air	-	1 Draft RPP

*Tabel 17. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air :
Sasaran Unit Kerja # 2/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air	
Sasaran Unit Kegiatan # 2/5	:	Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya sarana pemantauan kualitas air secara kontinyu dan online pada 15 DAS prioritas	2 sungai	5 sungai
2.	Tersedianya perhitungan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban pencemaran	3 sungai	7 sungai
3.	Tersedianya status mutu air dan indeks kualitas air	33 Provinsi	34 Provinsi

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Terlaksanannya penerapan alokasi beban pencemaran dalam penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air di daerah	2 Kab/kota	15 kab/kota
5.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria kualitas air dalam pelaksanaan inventarisasi dan penetapan alokasi beban pencemaran	6	1

*Tabel 18. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air :
Sasaran Unit Kerja # 3/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air	
Sasaran Unit Kegiatan # 3/5	:	Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Ekstraktif	927	927
2.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Pengolahan	817	817
3.	Terlaksanannya pilot project penurunan beban pencemaran air limbah dari industri ekstraktif dan pengolahan	4 jenis industri	6 jenis industri
4.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria pencegahan pencemaran dari sektor industri	-	2

Tabel 19. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air :
Sasaran Unit Kerja # 4/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air		
Sasaran Unit Kegiatan # 4/5	:	Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah domestik dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Kegiatan Prasarana dan Jasa		284	284
2.	Terlaksananya pilot project penurunan beban pencemaran air limbah dari Kegiatan Prasarana dan Jasa		-	1 jenis kegiatan
3.	Terbangunnya IPAL Domestik sebagai pilot project untuk penurunan beban pencemaran air limbah dan meningkatnya kualitas air		4 Kab/Kota (5 lokasi)	2 Kab/kota (2 lokasi)
4.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria pencegahan pencemaran dari sumber domestik		1	2

Tabel 20. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air :
Sasaran Unit Kerja # 5/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air		
Sasaran Unit Kegiatan # 5/5	:	Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbangunnya IPAL usaha Skala Kecil (USK) sebagai pilot project penurunan beban pencemaran dari sumber USK	8 Kab/kota (8 lokasi)	2 Kab/kota (2 lokasi)
2.	Terbangunnya model pengelolaan air limpasan (sumber non institusi)	-	1 kab/kota
3.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria pencegahan pencemaran dari sumber USK dan non Institusi	1	2

e. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki 5 (lima) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 21. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #1/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara		
Sasaran Unit Kegiatan # 1/5	:	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara		
No	Indikator Unit Kegiatan		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran udara	3 Dok	1 Dok
2.	Tersusunnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengendalian pencemaran udara	-	3 kerjasama
3.	Tersedianya Baku Mutu Pengendalian Pencemaran Udara	1 Baku Mutu	2 baku mutu
4.	Tersedianya draft Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara	-	1 Draft RPP

*Tabel 22. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #2/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara	
Sasaran Unit Kegiatan # 2/5	:	Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi di kab/kota dan 7 sektor industri serta pemutakhirannya	1 kota 30 perusahaan	8 kota 40 perusahaan
2.	Tersedianya Status Mutu Udara		34 Prov
3.	Terlaksananya penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara (WPKU)		1 kota

*Tabel 23. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #3/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara	
Sasaran Unit Kegiatan # 3/5	:	Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi darat	-	1 dok
2.	Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat	3 dok	1 dok
3.	Evaluasi penerapan green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi darat	Kriteria GT	3 kota
4.	Terpenuhinya baku mutu kualitas udara ambien perkotaan	29 Kota	33 Kota
5.	Evaluasi penerapan green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat	-	-

*Tabel 24. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #4/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara	
Sasaran Unit Kegiatan # 4/5	:	Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya model penurunan beban pencemaran udara di 7 sektor	7 sektor	10 industri
2.	Terlaksananya evaluasi kinerja industri Energi Migas dan Pertambangan	448 industri	448 industri
3.	Terlaksananya evaluasi kinerja industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa	1693 industri	1693 industri
4.	Tersedianya pedoman dan bahan masukan teknis penyusunan NSPK Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	1 dok	2 dok

*Tabel 25. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #5/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara	
Sasaran Unit Kegiatan # 5/5	:	Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpetakannya lokasi penempatan dan pengembangan sistem jaringan AQMS di 45 kota	1 Dok. (45 kota)	-
2.	Terlaksananya pemasangan peralatan serta sistem jaringan AQMS dan terpublikasinya data kualitas udara ambiendi 45 kota	-	3 kota
3.	Tersusunnya kajian strategis dan pedoman pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan gangguan	1 dok	1 dok

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Memastikan terselenggaranya pengendalian pencemaran udara dalam ruangan pemukiman dan gangguan	-	.
5.	Tersedianya laporan pengendalian pencemaran udara	1 lap	1 lap

f. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka memiliki 3 (tiga) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 26. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #1/3

Unit Kegiatan	:	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	
Sasaran Unit Kegiatan # 1/3	:	Efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya rencana tata kelola pemulihan lahan akses terbuka	-	23 kab/ kota

No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Evaluasi pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka	-	23 kab/kota
3.	Tersedianya laporan pemulihan lahan akses terbuka	1 lap	1 lap
4.	Tersedianya draft permen pemulihan lahan akses terbuka	-	1 Draft Permen

Tabel 27. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #2/3

Unit Kegiatan	:	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	
Sasaran Unit Kegiatan # 2/3	:	Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data kerusakan	3 prov	3 prov
2.	Tersedianya Indeks Tutupan Lahan	33 Prov	33 Prov
3.	Tersedianya pelebagaan pertambangan rakyat	3 prov	3 prov

Tabel 28. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #3/3

Unit Kegiatan	:	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	
Sasaran Unit Kegiatan # 3/3	:	Efektivitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta hasil pelebagaan pemangku kepentingan	
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah kabupaten /kota yang terfasilitasi pencegahan kerusakan lahan akses terbuka	-	23kab /kota
2.	Persentase luas lahan yang terfasilitasi pemulihan kerusakan lahan bekas pertambangan	5%	10%
3.	Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan	46	46



